

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan dari setiap negara termasuk Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan pembangunan nasional di segala bidang seperti bidang ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan sebagainya. Menurut Waluyo (2008:2) “Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual”. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak memiliki peranan yang penting baik sebagai sumber pembiayaan pembangunan maupun sebagai alat untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pembangunan. Oleh karena itu, pajak bukan hanya sekedar kontribusi masyarakat kepada pemerintahannya, tetapi lebih penting lagi bahwa pajak itu merupakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah bagi pertumbuhan bangsa dan negara untuk masa-masa yang akan datang. Peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya perlu ditingkatkan, maka pemerintah harus melakukan sistem pemungutan pajak dalam memperhatikan asas-asas yang berlaku.

Sistem Pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System*. Dalam *Official Assessment System*, pemerintah aktif menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang dan wajib pajak akan membayar jumlah tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dalam *Self Assessment System*, wajib pajak sendiri yang akan menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam *Withholding System*, pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu pajak yang menerapkan *Withholding System* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.”.

Kontribusi PPh Pasal 21 terhadap anggaran penerimaan PPh melalui *Withholding System* berkisar antara 26%-27% dengan porsi yang tertinggi pada APBN tahun 2006-2007. Bagi pemotong PPh Pasal 21 (perusahaan), harus mampu dan memahami tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar pembayaran PPh Pasal 21 tersebut efektif dan efisien. Efektif dalam hal pembayaran PPh Pasal 21 tepat waktu dan efisien dalam besarnya pajak sesuai dengan yang harus dibayarkan dan dikenakan denda. Oleh karena itu wajib pajak pemotong harus merencanakan terlebih

dahulu penghitungan PPh Pasal 21, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga (3) macam metode pemotongan pajak PPh Pasal 21 yaitu : *Net method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. *Gross Method* adalah pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. *Gross-up method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawannya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjalankan penerapan pajak ini adalah metode *Gross-up*.

Dengan metode *Gross-up*, biaya pajak penghasilan karyawan tetap akan diperlakukan sebagai tunjangan pajak bagi karyawan tetap. Sehingga tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sama besarnya dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh karyawan tetap atau dengan kata lain penerapan metode *Gross-up* akan menyebabkan penghasilan yang diterima karyawan tetap setelah dikurangi PPh 21 akan sama dengan penghasilan brutonya sebelum penerapan metode *Gross-up* (Leo Sanjaya Gunawan: 2004).

PT “X” adalah perusahaan jasa yang bergerak dibidang kontraktor. Pada dasarnya PT “X” dalam menjalankan kegiatannya tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban-kewajiban pajak termasuk diantaranya kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang terutang. Karyawan PT “X” terdiri dari karyawan tetap, karyawan tidak tetap, dan karyawan harian. PT “X” sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Didalam melakukan penghitungan PPh 21, terkadang bisa timbul kesalahan penghitungan PPh 21 yang akan merugikan perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menulis judul: “Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan tetap dengan penerapan metode *Gross-up* pada PT “X” di Makassar ”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan penerapan metode *Gross-up* menguntungkan bagi perusahaan.

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis penerapan metode *Gross-up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap akan menguntungkan bagi perusahaan.

## **D. Manfaat Penulisan**

### **1. Bagi Penulis**

Dapat menjadi sumber informasi tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dengan penerapan metode *gross-up*.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dengan penerapan metode *gross-up* yang akan menguntungkan bagi perusahaan